



## Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend

Endah Sri Mindari<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badegan Ponorogo, Indonesia

<sup>1</sup> endahndari354@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 9 Juni 2022;*

*Revised: 27 Juni 2022;*

*Accepted: 14 Juli 2022;*

Kata-kata kunci:

Konflik;

Papua;

Studi Kasus.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan dan melihat dari sudut pandang Paul Feyerabend mengenai konflik Papua Merdeka. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Hasil penelitian mengungkapkan fenomena konflik Papua Merdeka menggunakan sudut pandang atau perspektif dari Paul Feyerabend merupakan dinamika sosial yang melawan sebuah sistem seperti *againts method* oleh Feyerabend. Kedua, masyarakat Papua merasa tidak menerima cukup hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia melakukan perlawanan dan upaya pemisahan diri dari kungkungan Indonesia. Ini sama seperti demokrasi sosial oleh Feyerabend yang tujuannya adalah menciptakan suatu kondisi kebebasan dari kurungan suatu tirani dominasi yang telah terlembagakan. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sama seperti prinsip *anything goes* Feyerabend. Cara mengatasi konflik adalah dengan membawa perdamaian, keadilan dan kesetaraan di Papua.

---

Keywords:

*Conflict;*

*Papua;*

*Case Studies.*

---

### ABSTRACT

***Analysis of The Case Study of The Independent Papua Conflict Using Paul Feyerabend's Point of View.*** This research aims to find a relationship and look from Paul Feyerabend's point of view regarding the Free Papua conflict. This research method uses qualitative methods with a case study approach. Case studies are simply defined as the process of investigation or examination in depth, detail, and detail on a particular or special event that occurs. The results revealed the phenomenon of the Free Papua conflict using the point of view or perspective of Paul Feyerabend is a social dynamic that fights a system such as *againts method* by Feyerabend. Second, papuans feel they do not receive enough rights as part of the Indonesian nation to fight and secession from the Indonesian environment. This is just like social democracy by Feyerabend whose goal is to create a condition of freedom from confinement of an institutionalized tyranny of domination. That's exactly what the people of Papua want. Their right to self-determination is the same as the principle of anything goes Feyerabend. The way to overcome conflict is to bring peace, justice and equality in Papua.

---

Copyright © 2022 (Endah Sri Mindari). All Right Reserved

How to Cite : Mindari, E. S. (2022). Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 2(2), 63–68. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i5.432>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya (Sutardi, 2007). Indonesia adalah rumah bagi puluhan orang dengan budayanya masing-masing. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, suku, budaya, bahasa dan agama, hampir tidak ada negara sejenis di dunia ini. Kenyataan inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia juga memiliki ribuan suku, bahasa, dan kepercayaan lokal. Jumlah pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia diperkirakan ratusan bahkan ribuan. Mengenai ras dan bahasa, data menyebutkan dalam laporan yang dirilis pada tahun 2010 bahwa ada 1.331 suku dan subsuku di Indonesia, dan ada sebanyak 652 bahasa daerah di Indonesia (Ambardi, 2016).

Ironisnya, seperti yang telah kita saksikan saat ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam dinamika kehidupan. Keanekaragaman Indonesia terdiri dari dua pedang, pedang pertama menunjukkan keunggulan dan keunikan kekayaan negara, bahkan dapat mendukung kelangsungan hidup dan ekonomi Indonesia melalui budaya yang kaya dengan nilai pasar yang tinggi. Bahkan, keragaman ini bisa menjadi identitas nasional yang selalu bersatu. Di sisi lain, keragaman ini juga dapat menimbulkan konflik dan perselisihan yang berujung pada perbedaan pendapat. Perlu dicatat bahwa menyatukan keragaman bukanlah hal yang mudah, terutama ketika tidak ada rasa kebersamaan dalam berbagai komunitas. Selain Amerika Serikat dan India, Indonesia merupakan negara yang paling beragam di dunia (Lestari, 2015). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keragaman Indonesia menjadi batu bara dalam sekam, yang dapat dengan mudah dinyalakan dan dipanaskan setiap saat.

Di Indonesia terdapat beberapa gerakan yang bergerak atas dasar suatu identitas tertentu. Salah satunya adalah gerakan berbasis identitas etnis yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka dan keluar sebagai provinsi di Indonesia. Menurut mereka negara telah menunjukkan ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Papua, terutama karena distribusi sumber daya yang tidak merata antara Papua dan daerah lain. Namun, ketimpangan ekonomi tidak cukup untuk mendorong politik identitas di Papua. Orang Indonesia lainnya juga turut andil dalam lahirnya fenomena ini.

Hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji fenomena ini dalam konteks aktivisme, politik identitas, dan gerakan sosial baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sudut pandang Paul Feyerabend memandang tentang Konflik Papua Merdeka? Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mencari hubungan dan melihat dari sudut pandang Paul Feyerabend mengenai Konflik Papua Merdeka.

Tinjauan pustaka penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan siapa Feyerabend. Paul Karl Feyerabend lahir di Wina pada 13 Januari 1924. Keluarga Feyerabend tergolong kelas menengah, ayahnya seorang pegawai negeri dan ibunya seorang penjahit. Feyerabend mengalami masa kecilnya ketika Wina terpengaruh oleh berbagai masalah sosial terkait dengan Perang Dunia Pertama. Kelaparan, kerusuhan dan inflasi. Feyerabend pada masa kecilnya adalah anak pintar yang mempelajari fisika, matematika, dan astronomi (Farhan, 2020).

Melalui anarkisme epistemologis, Feyerabend sepenuhnya menyangkal kekuatan narasi besar untuk menjelaskan realitas. Pemikiran Feyerabend sering dianggap sebagai musuh sains karena mengandung semangat perlawanan. Penolakan Feyerabend untuk menciptakan sains bermula dari ketidakpercayaannya terhadap sains. Perkembangan ilmu pengetahuan seringkali mengarah pada pemujaan terhadap ilmu itu sendiri, jika demikian halnya, maka ilmu pengetahuan tidak lagi berbeda dengan doktrin dogmatis agama. Anarkisme epistemologis dalam pemikiran Feyerabend adalah anarkisme teoretis, yang berarti bahwa sejarah ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak hanya memuat fakta dan kesimpulan, tetapi juga gagasan dan penjelasannya. Anarkisme epistemologis sebagai konfrontasi dengan status quo tentu tidak mungkin tanpa masalah, apalagi jika diterapkan pada

masyarakat dengan tradisi keagamaan yang menindas, yakni tradisi yang mengarah pada penindasan yang dianggap biasa. Karena konsep Feyerabend membutuhkan pemikiran ulang yang penting tentang kenyataan, terutama dalam perjalanan cerita, itu berubah secara seimbang.

### **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Nazir, 1988). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus ini, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini, yaitu jurnal mengenai sudut pandang dan pemahaman teori-teori. Analisis data menggunakan teknik pembacaan dokumen, dan memberi penafsiran dengan sudut pandang keilmuan

### **Hasil dan Pembahasan**

Puncak dari persoalan integrasi politik di Irian Jaya dimulai pada akhir tahun 1949 ketika pihak Indonesia dan Belanda berada di KMB. Dalam perundingan tersebut, Indonesia dan Belanda gagal mencapai kesepakatan tentang kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta tidak mau mengubah posisinya. Mereka sudah ada jauh sebelum deklarasi. Wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Belanda menolak keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia, yang menyebabkan kedua belah pihak sepakat untuk menunda perundingan selama satu tahun. Kedua belah pihak sepakat untuk menunda pembahasan masalah Irian-Jaya agar berhasil menyelesaikan KMB pada tanggal yang disepakati, 2 November 1949 (Nazarudin Shyamsuddin, 1989: 90-91).

Sejarah menunjukkan bahwa permasalahan Papua disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Indonesia dan Belanda pada pertemuan meja bundar (KMB) akhir tahun 1949. Dalam perundingan tersebut, Indonesia dan Belanda gagal mencapai kesepakatan pendapat bersama. perjanjian wilayah Indonesia. Menanggapi kebijakan dekolonisasi pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mendirikan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang merupakan katalisator politik bagi pemerintah Indonesia. TRIKORA memaksa pemerintah Belanda untuk menandatangani Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda menyerahkan kendali atas Irian Barat kepada United Nations Transitional Authority (UNTEA) pada tanggal 10 Oktober 1962 untuk tujuan 1 Januari. 1963. Pada bulan Mei, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya, Indonesia terpaksa melakukan survei opini publik (PEPERA). Hasil adopsi Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) pada 19 November 1969. Dari perspektif hukum internasional, Irian Barat dan Irian Jaya resmi menjadi wilayah Indonesia.

Pada masa-masa awal integrasi Irian Jaya dengan Indonesia, Badan Operasi Khusus (opsus) Irian Jaya terlibat aktif dalam pengembangan dan pengembangan berbagai perangkat yang diperlukan untuk meningkatkan integrasi dengan Indonesia. Di sisi lain, kader-kader nasionalis Papua yang sebelumnya membutuhkan pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan Irian Barat untuk menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau *underground*. Gerakan ilegal ini ingin memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya secara terpisah dari pemerintah Belanda dan Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001).

Hal ini tercermin dari pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di bawah pimpinan Mayor Permanes Ferri Awom, mantan pimpinan Korp Vrijwilligers Papua (Kamp Relawan Papua) yang didirikan oleh anggota Belanda. Seluruh wilayah Irian Barat yaitu: Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen-Varopen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Menurut Aditjondro, gerakan OPM dimulai pada 28 Juli 1965, ketika sekelompok orang dari

suku Arfak menyerang markas Batalyon 751 Manokwari . Pemberontakan OPM menyebar ke beberapa daerah di Irian: Jaya-Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Varopen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Termasuk brosur dan berbagai vandalisme. Tindakan tersebut mengakibatkan banyaknya penyeberangan perbatasan di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini.

Nama OPM kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut Irian Jaya dan organisasi atau faksi di luar negeri. OPM adalah organisasi yang dijalankan oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat, yang bertujuan untuk memisahkan dan membebaskan Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. OPM lahir dan besar di Irian Jaya. OPM pada awalnya terdiri dari dua fraksi: 1) organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Aser Demotekai di Jayapur pada tahun 1963, dan 2) sebuah organisasi atau fraksi yang didirikan oleh Therianus Aronggoar di Manokwari pada tahun 1964. Kedua faksi ini bergerak di bawah tanah.

Selanjutnya, OPM menjadi organisasi yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. OPM telah menjadi gerakan separatis yang lebih terorganisir, meskipun sebenarnya OPM cukup sporadis, masih merupakan tanda dari gerakan organisasi ini. Bagi pemerintah yang berkuasa, operasi penjaga perdamaian dapat dilihat sebagai upaya untuk melawan pemerintah berdaulat yang sah. Pemerintah menilai operasi perdamaian merupakan gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan merusak semangat nasionalisme.

Strategi baru gerakan sosial juga terlihat pada gerakan OPM (Ilmar, 2017). Pemerintah Indonesia tampaknya dibuat bingung dengan aksi demonstrasi, pembentukan opini publik tentang penindasan terhadap rakyat Papua, munculnya logo Bintang Kejora, dan upaya untuk mendapatkan dukungan internasional untuk OPM. Berbagai upaya tersebut merupakan upaya OPM untuk mendapatkan pengaruh. Namun, OPM juga melancarkan perjuangan bersenjata untuk menghancurkan negara Indonesia. Berbagai serangan teroris terhadap Tentara Nasional Indonesia di Papua dapat dijelaskan sebagai bentuk perlawanan OPM terhadap NKRI.

OPM sebelumnya disebut organisasi tanpa struktur organisasi dan jaringan yang jelas. Sejak Orde Baru, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai tindakan militer dan tindakan kompromi untuk menekan gerakan melawan senjata OPM. Namun, selama ini OPM selalu ada, dibentuk dari pengibaran bendera Bintang Kejora dan aksi teror terhadap TNI. Pendukung OPM berasal dari berbagai kelas dan kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa OPM memiliki struktur yang fleksibel dan cakupan peserta yang luas, mulai dari kelas menengah baru dan lama serta kelompok feri.

Gerakan OPM lahir dari bentuk aktivis gerakan politik identitas berbasis ras yang menetapkan tujuan Papua merdeka. Dengan diumumkannya tujuan ini, OPM mulai melakukan perlawanan konfrontasional dengan pemerintah Indonesia, seperti perlawanan bersenjata dan bentuk perlawanan lainnya. Oleh karena itu, dari perspektif radikalisme gerakan OPM, ciri-ciri gerakan sosial baru dan perjuangan alternatif yang dikemukakan Laclau dan Murphy melalui perjuangan demokrasi tidak sepenuhnya berkaitan dengan hakikat gerakan dan perjuangan OPM. Meskipun Gerakan Rakyat terus melakukan diplomasi dan bentuk perjuangan demokrasi lainnya, termasuk berbagai insiden perlawanan bersenjata termasuk deklarasi Papua sebagai daerah operasi militer beberapa dekade lalu, perlawanan bersenjata dapat dikatakan sebagai bentuk perjuangan non-demokrasi.

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak yang berkembang secara dinamis dan prinsip kontroversial dalam hukum internasional kontemporer. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti status hukum, konsep dan kinerja. Prinsip hukum. Pertama, hak menentukan nasib sendiri telah mengubah landasan hukum internasional tradisional dan merupakan konsep baru dalam hukum internasional yang akan segera diterapkan. Di sisi lain, ada juga pembatasan hukum, dan hak untuk menentukan nasib sendiri hanya untuk proses dekolonisasi.

Proses dekolonisasi yang berusaha mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya dimulai pada awal abad ke-20 dan menyebar setelah Perang Dunia II (Perang Dunia II)

setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Oktober. Persatuan negara-negara. Melalui rencana dekolonisasi, ia telah memainkan peran penting dalam perubahan sejarah ini, mendukung aspirasi negara-negara yang masih dijajah, dan menetapkan tujuan dan standar untuk mempercepat kemerdekaan negara-negara terjajah (Harun, 2020; Aji, & Hermawan, 2020).

Di Indonesia, Organisasi Papua Merdeka (OPM) berupaya pada penentuan nasib sendiri. Menurut Amich Alhumami, konflik di Papua dapat dilihat dari dua perspektif: ekonomi dan politik. Faktor utama yang dapat menjelaskan perekonomian adalah perkembangan sumber daya alam di Papua. Orang Papua merasa tidak ada manfaatnya. Kebijakan pemerintah pusat telah menciptakan kekosongan dalam kesejahteraan ekonomi rakyat. Ketidakpuasan terhadap marginalisasi pemerintah pusat membuat beberapa kelompok elit di Papua memperjuangkan kemerdekaan.

Anarkisme epistemologis, yang membawa salah satu prinsip penting *anything goes* bersama dengan prinsip *proliferation*, tidak hanya didedikasikan oleh Feyerabend untuk kepentingan komunitas ilmiah, tetapi juga didedikasikan untuk perjuangan yang lebih praktis di bidang sosial. Bagi Feyerabend, anarkisme epistemologis tidak hanya penting bagi pengembangan metodologi, tetapi juga semacam visi kemanusiaan, yang diungkapkan dalam bukunya: "Keragaman teori dan visi metafisika tidak hanya penting bagi metodologi, tetapi juga merupakan komponen esensial dari sudut pandang kemanusiaan" (Feyerabend, 1982: 53). John Preston (2002: 21) menulis bahwa pemikiran politik Feyerabend adalah liberalisme dan demokrasi sosial.

Upaya Feyerabend dalam bukunya *Against Method* bukanlah mengarah kepada intelektual saja tetapi kemanusiaan. Ini berarti bahwa produksi pengetahuan tidak boleh dimonopoli. Ini bukan untuk mengatakan bahwa hanya satu pengetahuan yang dapat bertahan, dan segala sesuatu yang lain harus mati atau berhenti. Hal ini jelas bertentangan dengan toleransi yang ada dalam kehidupan manusia. Bagi Feyerabend, sains bukan sekedar cara tertentu untuk mendapatkannya, melainkan sebuah produk yang dibuat dengan cara yang berbeda-beda selama ini.

Prinsip *anything goes* memungkinkan semua metode dan teori digunakan, dan mudah-mudahan ini akan mengarah pada debat dan penyebaran pengetahuan yang dinamis. Cabang-cabang pengetahuan tertentu akan muncul tanpa ada upaya untuk menguasai cabang-cabang pengetahuan lainnya. Prinsip *anything goes* Feyerabend akhirnya melahirkan pluralisme metodologis, di mana ilmuwan bebas dapat mengikuti paradigma tertentu, upaya ilmiah kritis, dan tren lainnya, sehingga pengetahuan tertentu tidak lagi menjadi ideologi atau mitos.

Dengan gagasan tentang sosial demokrasinya, Feyerabend berharap dapat menciptakan kondisi membebaskan dari tirani yang berkuasa berdasarkan bahasa komunitas ilmiah. Sesuai dengan slogan "apa saja boleh", prinsip "pengembangbiakan" menggantikan rasionalisme ilmiah yang digambarkan dalam slogan pemalsuan, induksi dan agenda penelitian.

Dalam hubungan antara sudut pandang Paul Feyerabend dalam memandang konflik Papua Merdeka, telah banyak dituliskan di atas tulisan ini bahwa Paul Feyerabend dan teorinya yaitu anarkisme epistemologis yang pada dasarnya adalah sebuah konsep untuk melawan hal-hal yang bersifat kaku dan hanya berlandaskan pada ketetapan satu metode. Feyerabend berusaha membebaskan para ilmuwan dari keterbatasan metode. Dalam pandangannya, peran metode dalam ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran ilmuwan itu sendiri. Sejarah perkembangan ilmiah menunjukkan bahwa ilmuwan besar seperti Galileo, Newton, dan Einstein. Hal yang tidak terbatas pada metode yang terlalu standar. Mereka berhasil memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan secara bebas dan kritis memaparkan pandangan mereka tentang realitas (Donatus, 2015).

Sama seperti masyarakat Papua yang memandang bahwa mereka bisa saja hidup dengan merdeka sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat, meski sekarang Indonesia memiliki Papua sebagai provinsi tetapi siapa yang lebih membutuhkan antara keduanya? Menurut saya Indonesia lebih butuh Papua terutama dalam hal SDA alamnya. Papua selama ini termarginalkan, hanya dimanfaatkan

dan diperas hasil alamnya tanpa berimbang dengan pembangunan dan infrastrukturnya. Hal inilah Papua memungkinkan memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri (Drooglever, 2010).

### Simpulan

Upaya melihat fenomena konflik Papua Merdeka menggunakan sudut pandang atau perspektif dari Paul Feyerabend dinamika sosial yang terjadi seakan melawan sebuah sistem seperti *againts method* oleh Feyerabend. Masyarakat Papua yang merasa tidak menerima cukup hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia melakukan perlawanan dan upaya pemisahan diri dari kungkungan Indonesia. Ini sama seperti demokrasi sosial oleh Feyerabend yang tujuannya adalah menciptakan suatu kondisi kebebasan dari kurungan suatu tirani dominasi yang telah terlembagakan. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Hak untuk menentukan nasib sendiri sama seperti prinsip *anything goes* Feyerabend. Cara baru untuk membawa perdamaian, keadilan dan kesetaraan di Papua. Saran penelitian adalah bahwa pemerintah harus memprioritaskan dialog bilateral untuk mengimplementasikan lima poin jalan perdamaian. Melalui dialog antara pemerintah Indonesia dengan semua pihak di Papua, diharapkan konflik tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk pengakuan politik terhadap masyarakat adat Papua.

### Referensi

- Aji, R. B., & Hermawan, E. S. (2020). Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme.
- Ambardi, K. (2016). Faktor Demografi dalam Strategi Elektoral Pilkada: Perspektif dari Lapangan. *Populasi*, 24(2), 1-22.
- Donatus, S. K. (2015). Teori Kritis dan Relevansinya Untuk Pengkajian Terhadap Realitas Sosial Bangsa Indonesia. *Jurnal Ledalero*, 14(1), 159-181.
- Drooglever, P. J. (2010). *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farhan, I. (2020). Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 109-130.
- Harun, U. (2020). Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim.
- Ilmar, A. (2017). Radikalisme gerakan berbasis etnis: Kasus Organisasi Papua Merdeka. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 72-87.
- Intan, H. R., & Ruhaeni, N. (2017). Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka. *Ilmu Hukum*, 403-409.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mambraku, N. S. (2015). Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik. *Kajian*, 75-85.
- Mishael, G., Setiono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Review*, 1-12.
- Mubarok, A., Sari, P. I., & Ramadania. (2020). Tantangan Keberagaman Beragama Dalam Ikatan Bhineka Tunggal Ika Di Era Milenial. *Jurnal Penelitian Agama*, 1-8.
- Sutardi, T. (2007). *Antropologi: Mengungkap keragaman budaya*. PT Grafindo Media Pratama.
- Tahir, M. (2016). Kontribusi Pemikiran Filsafat Anarkisme Epistimologis Paul K. Feyerabend Terhadap Studi Islam. *Lentera*, 1-13.
- Widarda, D. (2019). Demokrasi Sosial dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 184-203.